

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perancis merupakan salah satu negara tujuan utama imigran dimulai sejak Perang Dunia (1914-1918). Imigran datang ke Perancis dengan tujuan utama mencari lapangan pekerjaan sebagai buruh karena saat itu Perancis berada pada kondisi despresi ekonomi—kekurangan tenaga kerja pasca destruksi perang (Pabottingi, 2008). Kemudian Perang Dunia II dan Revolusi Industri semakin meningkatkan gelombang imigran ke Perancis. Imigran asal Aljazair, Maroko, Tunisia, Portugal, Polandia, dan Turki merupakan pendatang terbesar yang masuk ke Perancis dan mayoritas dari mereka beragama Islam (Arighi, 2017). Jumlah imigran Muslim asal Afrika yang terus menerus meningkat menjadikan populasi Muslim di Perancis semakin bertambah. Hingga Perancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa dengan jumlah 5,7 juta jiwa pada tahun 2016 atau sebesar 8,8% dari total penduduk Perancis disusul oleh Jerman dengan empat juta jiwa (Guardian, 2017). Seiring perkembangan populasi Muslim di Perancis, pemerintah Perancis membangun masjid sebagai upaya penyediaan sarana ibadah. Hingga kini terdapat lebih dari 2.500 masjid yang berdiri di Perancis (New York Times, 2019). Interaksi imigran dan warga Perancis terjalin harmonis hingga peristiwa teror terbesar terjadi pada 11 September 2001 di Amerika Serikat atau dikenal dengan peristiwa 9/11. Sikap dan persepsi masyarakat Perancis terhadap imigran berubah negatif karena masyarakat menganggap Islam yang bertanggung jawab atas peristiwa terorisme tersebut (Pabottingi, 2008). Teror terus terjadi hingga kini, tercatat sejak 2015 belasan tindakan teror berupa penembakan dan pembunuhan terjadi di Perancis atas nama pembelaan terhadap Islam (Straits

Times, 2018). Dimulai sejak peristiwa penembakan di kantor majalah Charlie Hebdo pada 2015 hingga penembakan di Strasbourg 2018.

Berbagai ancaman tersebut membuat ketakutan tersendiri bagi masyarakat Perancis terlebih melimpahnya jumlah imigran Muslim yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketakutan-ketakutan tersebut dikatakan sebagai wujud Islamofobia masyarakat Perancis akan imigran khususnya imigran Muslim. Keberadaan *The Collective Against Islamophobia in France* atau *Collectif Contre L'Islamophobie en France* (CCIF) merupakan organisasi pejuang hak asasi manusia dengan misi memerangi Islamofobia dan diskriminasi yang diakibatkannya (Islamophobie, 2000). Organisasi tersebut didirikan sebagai respon banyaknya fenomena Islamofobia di Perancis berwujud diskriminasi. Diskriminasi paling banyak dilakukan terhadap wanita Muslim dengan persentase 74% terjadi di instansi dan 64% di layanan publik pada 2015 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (Islamophobie, 2016) Berdasarkan data, CCIF melaporkan pada kurun waktu 2003 hingga 2004 saja setidaknya terdapat 182 tindakan Islamofobik berupa penyerangan fisik terhadap individu, perusakan masjid, perusakan makam, dan penutupan proyek yang berkaitan dengan keagamaan Islam (Euro-Islam.info, 2018). Setelah peristiwa penembakan Charlie Hebdo 2015, persentase meningkat sebesar 110% atau peningkatan dua kali lipat dari angka pada 2014 (CNN, 2015).

Hingga pada 2004, Islamofobia berada pada titik klimaks—menjadi isu yang mengancam keamanan nasional—sehingga pemerintah Perancis berusaha melembagakan Islamofobia melalui berbagai kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri dalam upaya sekuritisasi. Perancis telah menetapkan undang-undang pelarangan simbol-simbol agama pada 2004 meliputi jilbab bagi kaum Muslim, salib bagi kaum Nasrani, dan kippa bagi kaum Yahudi dan diperkuat kembali pada 2010 dengan undang-undang anti burqa dan niqab (Rafsitahandjani et al, 2017). Kembali pada 2006, pemerintah Perancis di bawah Nicolas Sarkozy mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap imigran melalui kebijakan *France Immigration and Integration Law (Projet de Loi relatif à l'immigration et à l'intégration)* atau yang

dikenal dengan kebijakan seleksi imigran (Chou dan Baygert, 2007). Tiga poin utama dalam kebijakan tersebut yaitu (1) penyeleksian imigrasi (*immigration choisie*), (2) kewajiban integrasi (*mandatory integration*), (3) pembangunan (*co-development*) (Chou dan Baygert, 2007). Ketiga poin tersebut mengharuskan imigran menanggalkan identitas aslinya jika ingin menetap di Perancis. Selain itu, muncul Marine Le-Pen sebagai pemimpin partai sayap kanan atau Front-Nasional yang menggelorakan gerakan anti-imigran dan anti-Islam dan cukup mendapat banyak simpatisan dari berbagai kalangan di Perancis (Independent, 2017). Melalui pidatonya, Le-Pen menyatakan "...negara yang begitu kita cintai terlalu banyak mengalami terorisme, rasa tidak aman, bahkan serangan terhadap identitas nasional kita." (Independent, 2017).

Yang terbaru, pada masa pemerintahan Emanuel Macron tahun 2017 dikeluarkan undang-undang kebijakan imigran yang berisi pembatasan masa pencarian suaka dan mempercepat deportasi imigran dari Perancis. Masa pencarian suaka yang mulanya 120 hari dipercepat menjadi 90 hari sebagai upaya mempercepat deportasi untuk mengurangi gelombang imigran yang datang ke Perancis (France24, 2018). Rentetan kebijakan dan gerakan sosial tersebut menjadi semacam perisai untuk melawan imigran Muslim sebagai imigran terbesar di Perancis. Kepala Dewan Muslim Nasional Perancis, Mohammed Moussaoui mengatakan "*to raise the subject like this is a way of stigmatism Islam*" (Allen dan Nielsen, 2002). Kebijakan tersebut menurut Mohammed merupakan upaya memberikan stigma negatif terhadap masyarakat Muslim Perancis. Lebih jauh, kebijakan mengenai sekularisasi (*laïcité*) merupakan upaya pemerintah menjauhkan nilai-nilai Islam dari pemerintahan dan kehidupan sosial Perancis (Euro-Islam.info, 2018). Sehingga dapat dikatakan berbagai kebijakan tersebut merupakan wujud Islamofobia masyarakat Perancis terhadap imigran. "*Racism does not happen by accident. It is a system which mechanisms have been legitimised from within institutions*" dikutip situs Islamophobie (2016) menanggapi banyaknya tokoh politik yang secara terang-terangan menyatakan sikap anti-imigran dan

Islamofobik sehingga mendorong opini publik untuk mengembangkan Islamofobia dan diskriminasi.

Berbagai penelitian mengenai imigran Perancis dan dinamikanya telah banyak dilakukan. Kebanyakan penelitian menganalisis kebijakan pembatasan imigran yang dilakukan oleh pemerintah Perancis dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi dan permasalahan kependudukan (demografi). Penelitian oleh Chou dan Baygert (2007), Wicaksono (2010), dan Rafsitahandjani et al (2017) mendeskripsikan kebijakan imigran pada masa Nicolas Sarkozy. Benang merah dari ketiga penelitian tersebut yaitu menganalisis ketakutan masyarakat Perancis mengenai peningkatan imigran yang terus bertambah dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan permasalahan utamanya yaitu permasalahan ekonomi dan politik. Penelitian yang ditulis oleh Miranda (2017) menyoroti konflik sosial di Perancis antara imigran dan warga asli Perancis menggunakan sosiologi migrasi sebagai pisau analisa. Argumen utama dari penelitian tersebut yaitu adanya perbedaan latar belakang sejarah dan perbedaan identitas rasial yang menyebabkan kedua kelompok sosial sulit berintegrasi. Ketidakharmonisan hubungan kedua kelompok tersebut menyebabkan diskriminasi baik sosial maupun ekonomi seperti ketidaksetaraan upah antara kaum imigran dan warga asli Perancis. Penelitian lain yaitu Arighi (2017) menyoroti peran media khususnya *F de Souche* sebagai agen penyebar Islamofobia di Perancis. Penelitian tersebut menyatakan media sangat berperan menggiring opini publik mengenai suatu isu yang belum tentu terjamin kebenarannya. Penelitian Lebourg (2017) menganalisis bagaimana Islamofobia muncul setelah peristiwa 9/11 dan terus berkembang karena adanya globalisasi sehingga menimbulkan adanya masyarakat multikultural. Islamofobia dalam analisis Lebourg muncul karena adanya transformasi negara, masyarakat, dan pasar. Sedangkan penelitian Bell (2018) berargumen semakin banyak jumlah imigran di Eropa khususnya Perancis menyebabkan makin besar pula beban ekonomi yang ditanggung pemerintah. Sehingga, Islamofobia dan Antisemit digunakan sebagai istilah untuk mendiskreditkan imigran Muslim dan Yahudi yang dianggap menjadi ancaman sekaligus beban ekonomi. Penelitian terbaru oleh

Judaken (2018) menganalisis peristiwa Charlie Hebdo sebagai tonggak meletusnya Islamofobia di Perancis. Penelitian tersebut juga menjelaskan secara komprehensif bagaimana perubahan cara pandang masyarakat Perancis terhadap Muslim dan Islam sebelum dan setelah peristiwa Charlie Hebdo.

Penelitian-penelitian tersebut membantu penulis menggambarkan fenomena konflik antara imigran dan masyarakat Perancis beserta faktor penyebabnya. Selain itu, penelitian tersebut juga membantu memberikan data mengenai munculnya Islamofobia beserta fenomena-fenomena yang menjadikan Islamofobia semakin berkembang di Perancis seperti penembakan Charlie Hebdo 2015. Penelitian ini berbeda pada ruang lingkup kajian tidak hanya bersifat horizontal namun vertikal yaitu menghubungkan pengaruh kelompok sosial dalam masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sebagai aktor utama suatu negara. Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan deskripsi secara komprehensif mengenai konflik sosial yang timbul antara kelompok imigran Muslim dan masyarakat Perancis. Namun, penelitian lain tidak memberikan analisisnya pada proses suatu isu menjadi ancaman yang bersifat nasional berwujud kebijakan domestik dan luar negeri.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai analisis bagaimana kemunculan Islamofobia hingga proses politisasi Islamofobia menjadi sebuah ancaman domestik sehingga pemerintah berupaya melakukan sekuritisasi melalui kebijakan terhadap imigran khususnya imigran Muslim. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian terdahulu dengan menawarkan sudut pandang berbeda yaitu melalui kajian konstruktivisme. Penelitian ini diharapkan mampu mengurai alasan dibalik perubahan sikap Perancis yang mulanya terbuka kini menjadi lebih selektif terhadap imigran. Lebih jauh, penelitian ini bermanfaat memberikan sudut pandang baru mengenai kebijakan imigrasi dalam ruang lingkup konstruktivisme sehingga bermanfaat dalam studi hubungan internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan kunci: “Mengapa Islamofobia mendorong kebijakan diskriminatif terhadap imigran di Perancis?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijelaskan sebagai berikut

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan perubahan tindakan suatu negara yang dipengaruhi oleh figur politik dan kelompok penekan (*pressure group*) dalam melakukan politisasi suatu isu kepada publik yang bermuara pada upaya sekuritisasi pemerintah terhadap isu tertentu melalui kebijakan luar negeri.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu menganalisis dan menyimpulkan pengaruh figur politik dan kelompok penekan (*pressure group*) Perancis dalam upayanya melakukan politisasi Islamofobia sehingga pemerintah melakukan tindakan sekuritisasi Islamofobia melalui kebijakan imigrasi Perancis.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap penelitian sebelumnya khususnya dalam ruang lingkup kajian Konstruktivisme. Penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam menganalisis perubahan perilaku negara terhadap imigran yang dipengaruhi oleh figur politik dan kelompok penekan (*pressure group*). Melalui sudut pandang konstruktivisme khususnya konstruktivisme linguistik dan teori sekuritisasi penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih bagi khazanah ilmu Hubungan Internasional.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberi sebuah gambaran perubahan tindakan suatu negara dalam menghadapi lonjakan imigran yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi penelitian.

## **1.5 Kerangka Teori**

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian, penulis menggunakan teori konstruktivis linguistik dan teori sekuritisasi sebagai pisau analisa utama. Referensi utama teori konstruktivis linguistik berasal dari pemikiran Nicholas Onuf dan Friedrich Kratochwil. Selain teori konstruktivis linguistik, penelitian ini juga menggunakan asumsi-asumsi teori sekuritisasi yang diusung oleh Barry Buzan dan Ole Wæver (1998). Lebih jauh, penulis juga menggunakan konsep infrastruktur politik khususnya kelompok penekan dan figur politik dalam menganalisis peran tokoh politik Perancis terhadap perkembangan Islamofobia di Perancis. Selain itu, digunakan pula konsep pengaruh opini publik terhadap kebijakan luar negeri untuk menganalisis seberapa dominan opini publik berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.

### **1.5.1 Konstruktivisme Linguistik**

Konstruktivisme linguistik menitik beratkan fokus pada peran bahasa. Menurut konstruktivisme linguistik, gagasan menciptakan realitas sosial melalui medium bahasa seperti yang dikatakan John Austin "*to say something is to do something*" (Rosyidin, 2015: 93). Pemikiran ini muncul oleh Ludwig Wittgenstein (1889-1951) sebagai pengurai filosofi bahasa. Wittgenstein mengatakan bahasa selalui bermakna instruktif dan imperatif, yang berarti setiap ada seseorang yang mengucapkan kata-kata ada pihak lain yang merespon perkataan tersebut. Terdapat dua kemungkinan respon yang akan diberikan penerima kepada pengucap yaitu antara mendukung perkataan atau melawan perkataan. Lebih jauh, pemikiran tersebut dikembangkan oleh John Austin (1911-1960). Austin berpendapat bahwa bahasa memiliki dua makna yaitu mendeskripsikan dan atau menginstruksikan

(Rosyidin, 2015: 100). Makna pertama yaitu bahasa sebagai medium deskripsi bermakna menggambarkan sesuatu tanpa adanya makna tertentu. Sedangkan, pada makna kedua bahasa sebagai instruksi berarti terdapat keinginan pengucap agar pendengar melakukan tindakan sesuai instruksi yang diberikan pengucap. Seiring perkembangannya, pemikiran akan bahasa ditarik oleh Nicholas Onuf dalam ruang lingkup hubungan internasional dalam konstruktivisme linguistik. Konstruktivis meyakini ada hubungan timbal-balik antara agen dan struktur yang menggunakan bahasa sebagai perantara. Bahasa dapat berfungsi mendefinisikan identitas, menyediakan pilihan tindakan, dan lebih jauh sebagai medium mengarahkan tindakan agen (Rosyidin, 2015). Berbagai fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan. Terdapat dua fungsi aturan yaitu fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Pertama, aturan sebagai konstitutif berarti berfungsi sebagai konstruksi sosial. Kedua, aturan sebagai regulatif berarti aturan sebagai wujud kontrol sosial (Onuf dalam Pouliot, 2004). Aturan tidak menentukan tindakan agen namun, mempengaruhinya. Agen bertindak rasional dengan bertindak untuk mencapai tujuan tertentu (Rosyidin, 2015: 108).

Konstruktivis linguistik dikemukakan oleh Nicholas Onuf dan Friedrich Kratochwil yang menekankan pada interpretasi sebagai upaya untuk memahami maksud suatu tindakan. Keamanan menurut Ole Wæver (1995) merupakan 'tindak-tutur'. Isu keamanan ada akibat terciptanya ancaman. Isu yang sebelumnya dianggap bukan merupakan ancaman namun bisa secara tiba-tiba menjadi ancaman apabila isu tersebut diangkat oleh pemerintah. Jadi, pemerintahlah yang mengkonstruksikan adanya ancaman kepada publik. Konsep linguistik dalam isu sekuritisasi secara sederhana dianalogikan melalui slogan '*War on Terror*'. Semenjak George W. Bush mengeluarkan pernyataan "*Either you are with us, or you are with the terrorist*" banyak negara secara serentak mengimplementasikan undang-undang melawan terorisme.

### **1.5.2 Teori Sekuritisasi**

Teori sekuritisasi dicetuskan Wæver dan Buzan (1998) dengan merumuskan bagaimana keamanan tercipta. Buzan dalam bukunya '*Security: A*

*New Framework for Analysis*' (1998) membagi keamanan menjadi tiga sifat yaitu keamanan subjektif, objektif, dan intersubjektif (Buzan et al dalam Rosyidin, 2018). Keamanan subjektif hanya ada pada suatu aktor yang bersifat subjektif atau belum tentu dirasakan oleh pihak lain. Keamanan subjektif biasanya berasal dari aktor dominan (McDonald, 2008). Keamanan objektif disepakati sebagian besar aktor sebagai suatu ancaman yang biasanya bersifat tradisional seperti perang. Sedangkan keamanan intersubjektif yaitu keamanan yang telah diverifikasi dengan penerimaan tidak hanya oleh beberapa aktor namun oleh audiens (Rosyidin, 2018: 216).

Ole Waever menekankan keberhasilan proses sekuritisasi berada pada penerimaan aktor akan isu tersebut sehingga isu keamanan tersebut mampu diwujudkan melalui suatu tindakan tertentu (Buzan et al dalam Skidmore, 1999). Suatu isu dapat dikategorisasi sebagai isu keamanan setelah aktor berhasil melakukan pidato sekuritisasi. Keamanan berkaitan dengan *speech act* dimana apa yang suatu aktor tuturkan merupakan tindakan yang dilakukan aktor tersebut (Balzacq *et al.*, 2015). Semakin banyak aktor yang mengangkat isu ancaman maka semakin rentan pula masyarakat akan segregasi dan sensitivitas konflik (Baldwin dalam Rou, 2019). Secara singkat, teori sekuritisasi menganalisis bagaimana suatu isu memperoleh status sebagai isu keamanan akibat dari proses intersubjektivitas. Setelah isu ancaman terbentuk, upaya sekuritisasi segera dilakukan pembuat kebijakan atau aktor dengan melakukan cara apapun untuk menanggulangi ancaman (Rou, 2019).

Terdapat berbagai istilah untuk menganalisis proses sekuritisasi yaitu *referent object*, *securitizing actor*, dan *functional actor*. *Referent object* merupakan pihak yang secara langsung terkena ancaman. *Securitizing actor* adalah pihak-pihak yang mendeklarasikan ancaman. Sedangkan *functional actor* merupakan pihak-pihak yang ikut memengaruhi pembuatan kebijakan dan memiliki kepentingan dalam isu keamanan tersebut (Rosyidin, 2018: 217). Buzan mengkategorikan isu keamanan ke dalam beberapa sektor antara lain sektor militer, lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik (Rosyidin, 2018). Penelitian ini

menitikberatkan keamanan pada sektor sosial berkaitan dengan eksistensi identitas dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam sektor sosial masyarakat, adanya upaya sekuritisasi mampu menimbulkan konflik tidak hanya bersifat horizontal namun juga vertikal. Dalam ruang lingkup horizontal konflik dapat berupa tindakan diskriminasi sedangkan ruang lingkup vertikal konflik lebih bersifat struktural antara pemerintah terhadap kelompok sosial tertentu seperti kebijakan bersifat diskriminatif dan lain-lain (Rosyidin, 2018).

### **1.5.3 Infrastruktur Politik**

Almond dan Coleman membedakan struktur politik atas suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri atas struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik masyarakat, dan sektor politik masyarakat. Sedangkan suprastruktur politik terdiri atas sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, dan sektor politik pemerintahan. Penelitian ini menitikberatkan fokus pada peran dan fungsi infrastruktur politik dalam konsep komunikasi politik khususnya peran kelompok penekan (*pressure group*) dan figur politik dalam pembuatan kebijakan suatu negara. Infrastruktur politik didefinisikan segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing (McNair, 2018). Unsur komunikasi politik dalam lembaga infrastruktur politik terdiri atas beberapa kelompok antara lain partai politik, *interest group* (kelompok kepentingan), media komunikasi politik, *pressure group* (kelompok penekan), dan tokoh atau figur politik.

#### **a. Partai Politik**

Partai politik menurut Ramlan Surbakti yaitu sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun (Surbakti, 2007). Partai politik memiliki fungsi penting dalam proses politik

yaitu sebagai media komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik (A. Rahman H.I., 2007:103-104).

b. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell membagi kelompok kepentingan ke dalam empat kategori yaitu kelompok kepentingan anomik (bersifat informal dan insidental), kelompok kepentingan non-asosiasional (bersifat informal dan turun-temurun), kelompok kepentingan institusional (mewakili lembaga formal), dan kelompok kepentingan asosiasional (mewakili lembaga profesi) (A. Rahman H.I., 2007). Kelompok kepentingan bertujuan memperjuangkan suatu kepentingan dengan memengaruhi lembaga-lembaga politik untuk mendapat keputusan yang menguntungkan.

c. Media Komunikasi Politik

Media komunikasi politik memiliki peran sebagai penyampai informasi politik kepada masyarakat, penyalur aspirasi dari masyarakat ke pemerintah, sebagai sarana umpan balik terhadap kebijakan pemerintah, media sosialisasi politik bagi masyarakat, dan kontrol politik rakyat kepada pemerintah.

d. Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya pada pemerintah. Aktivitas kelompok penekan yaitu memberikan tekanan kepada pemerintah agar kepentingannya terakomodasi. Kelompok penekan seringkali melontarkan kritikan kepada pemerintah sebagai wujud kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Kelompok penekan juga mampu mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah melalui cara-cara politik seperti persuasi, negosiasi, hingga propaganda.

e. Tokoh Politik

Didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengalaman, kecerdasan, dan keahlian dalam bidang politik. Tokoh politik memiliki peran penting dalam penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam lembaga formal seperti lembaga legislatif, partai politik, dan lain-lain. Politikus atau figur politik adalah orang

yang memiliki otoritas untuk berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok—memiliki pesan mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok. Sekalipun demikian, ada juga politikus yang bertindak sebagai ideolog yang aktivitasnya membuat kebijakan yang luas, mengusahakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner (Leonardo W. Dob dalam Anggara, 2013). Daniel Katz membedakan tokoh politik dalam dua kategori yaitu elit ideolog (negarawan) dan elit partisan. Negarawan adalah figur yang dalam proses politiknya lebih memperjuangkan kepentingan bersama. Negarawan lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan reformasi dan kemajuan sehingga negarawan dikatakan lebih revolusioner. Sedangkan figur partisan yaitu orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan kelompok dibanding kepentingan bersama atau publik (A. Rahman H.I., 2007).

Lembaga infrastruktur politik memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur, bahkan menguasai sistem komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Hal tersebut berarti masyarakat lebih memiliki pengaruh yang besar dalam mengendalikan media komunikasi politik dalam kehidupan masyarakat dan negara (Surbakti, 2007). Lebih jauh, infrastruktur politik berfungsi sebagai komunikasi politik yaitu menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran golongan, asosiasi, maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan.

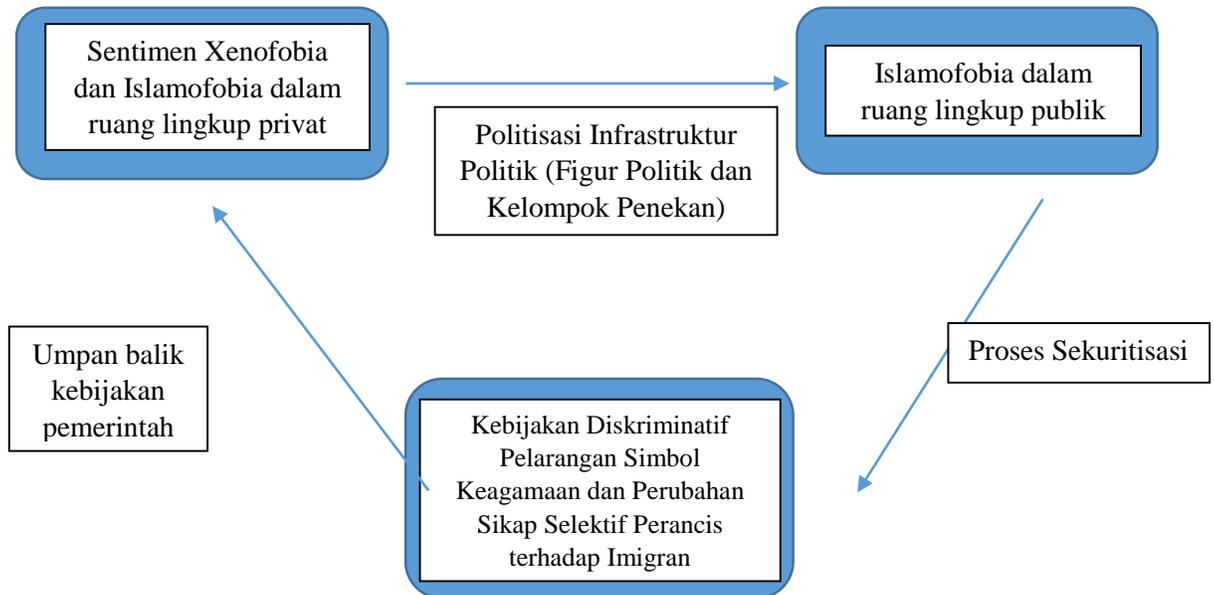
#### **1.5.4 Opini Publik dalam Kebijakan Luar Negeri**

Ilmu Hubungan Internasional memandang pengaruh opini publik ke dalam dua spektrum yaitu pandangan realis dan liberalis. Realis menurut Hans Morgenthau bersifat elit sentrisme. Opini publik menurutnya bersifat irasional, mudah berubah dan tidak konsisten, tidak terstruktur, tidak koheren, dan manipulatif (Holsti, 1992). Neo-realis menurut John J. Mearsheimer memandang kebijakan luar negeri dibuat atas dasar kepentingan nasional dan mengabaikan pandangan masyarakat yang subjektif dan emosional. Untuk itu, opini publik tidak dihiraukan oleh negara karena pembuat kebijakan adalah elit pemimpin yang

bijaksana dan mengerti kepentingan nasional negaranya. Menurut realis, kebijakan luar negeri lebih mementingkan faktor eksternal daripada faktor internal karena mempertimbangkan kekuasaan dan posisi suatu negara dalam sistem internasional yang anarki. Alih-alih mementingkan opini publik, pemerintah dapat melakukan penggiringan opini agar publik setuju akan keputusan yang pemerintah ambil (Almond, 1950 dalam Holsti, 1992). Realis berpandangan bahwa publik tidak dapat memerintah begitupula pemerintah tidak mampu diperintah oleh publik. Keputusan dalam kebijakan luar negeri merupakan hasil keputusan para elit pemerintahan (Holsti, 1992).

Menurut pandangan pluralis dan liberalis, opini publik cenderung bersifat relatif stabil, terstruktur secara rasional, konsisten, dan berdampak pada kebijakan luar negeri suatu negara. Liberalis menitikberatkan peran keterlibatan opini publik dalam suatu kebijakan luar negeri sebagai perwujudan negara yang demokratis. Pertimbangan pentingnya opini publik diurai melalui beberapa alasan. Pertama, dukungan publik merupakan bentuk legitimasi dari pemerintahan yang demokratis. Kedua, pemenuhan opini publik merupakan wujud kepatuhan pemerintah terhadap rakyat. Atau dengan kata lain pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Ketiga, pemimpin ingin mendapat validasi suara dari rakyatnya. Melibatkan opini publik dalam kebijakan luar negeri dilakukan semata-mata untuk mendulang suara pada pemilihan umum selanjutnya (Wittkopf, 1986). Mengeluarkan kebijakan luar negeri yang populer akan bermanfaat bagi pemilihan umum selanjutnya semata-mata untuk memperoleh dukungan secara masif. Secara singkat, keterlibatan opini publik dalam kebijakan luar negeri merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat karena pemimpin bertanggung jawab atas apa yang masyarakat kehendaki. Thomas Graham (1994) menyebutkan terdapat empat indikator opini publik berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri yaitu; tingkat dukungan publik untuk suatu kebijakan, efektivitas strategi komunikasi para elit politik, tahap proses kebijakan, dan kesadaran elit politik akan dimensi opini publik. Apabila

keempat indikator tersebut secara positif terwujud dengan baik maka besar kemungkinan keterlibatan opini publik dalam kebijakan luar negeri suatu negara.



## 1.6 Argumen Utama

Penelitian ini berargumen bahwa figur politik dan kelompok penekan (*pressure group*) Perancis berperan aktif dalam proses politisasi Islamofobia menjadi isu keamanan sehingga, Islamofobia dilembagakan pemerintah Perancis ke dalam kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri melalui pelarangan simbol keagamaan hingga pembatasan imigran khususnya imigran Muslim sebagai upaya sekuritisasi.

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif akan berorientasi mencari pemahaman dalam suatu kasus bertujuan untuk memahami beberapa aspek kehidupan sosial dan menggunakan beberapa metode yang umumnya menghasilkan kata-kata sebagai data untuk analisis (Weijer C et al, 2011). Metode ini menekankan pada pemahaman makna mengenai fenomena-fenomena sosial yang ada. Dokumen yang akan diteliti yaitu dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus penelitian seperti laporan mengenai peristiwa terorisme di Uni Eropa khususnya Perancis, diskriminasi Muslim di Perancis, dan

data-data hukum berupa kebijakan pemerintah Perancis maupun Uni Eropa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data sekunder berupa laporan, jurnal, artikel, surat kabar, dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melihat literatur-literatur yang relevan dengan fenomena imigran di Perancis.

Dilakukan sejak Februari 2019 penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam pencarian: berdasarkan publikasi, penulis yang ahli, dan kata kunci yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan publikasi, penelitian ini menggunakan publikasi yang relevan dengan isu imigran di Perancis misalnya publikasi dari jurnal Eurosor, Springer Nature, Jstor, dan Research Gate. Penulis juga mengumpulkan informasi dari situs berita seperti BBC News, Guardian, Reuters, France 24, The New York Times, Washington Post, CNN, dan lain-lain. Lebih jauh, penulis melakukan pencarian kata kunci melalui situs daring dan menemukan laporan, tesis, dokumen dan pidato yang berkaitan dengan topik penelitian seperti “Islamofobia”, “imigran Perancis”, “kebijakan imigrasi Perancis”, “Nicolas Sarkozy”, “Tokoh anti-imigran”, “Marine Le-Pen”, dan lain-lain. Data-data yang diperoleh dari berbagai literatur tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk membantu menganalisis fenomena yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan tahunan yang dikeluarkan oleh CCIF (*The Collective Against Islamophobia in France* atau *Collectif Contre L'Islamophobie en France*) dan *Euro Statistic* sebagai sumber data kuantitatif kenaikan jumlah imigran beserta fenomena Islamofobia di Perancis.

Setelah mendapatkan berbagai data yang diperlukan, penulis akan melakukan analisis data menggunakan metode *process-tracing*. Metode analisis *process-tracing* adalah metode menganalisis hubungan sebab-akibat dengan fokus pada bagaimana suatu variabel terbentuk dan mempengaruhi variabel lain (George dan Bennett, 2007). *Process-tracing* menganalisis hubungan antarvariabel independen, variabel intervening (*intervening variabel*), dan dependen dengan

menganalisis tahap demi tahap dari sebuah proses sehingga diketahui bagaimana perubahan terjadi dalam fenomena tertentu (Collier, 2011). *Intervening variabel* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel intervening merupakan variabel penyela antara variabel independen dan dependen sehingga variabel independen secara tidak langsung mempengaruhi timbulnya variabel dependen (Vogt, 2005).

Langkah awal yang dilakukan penulis yaitu mencari variabel independen, variabel intervening, dan dependen dari suatu kasus berdasarkan teori yang digunakan. Kemudian, penulis akan melakukan pembuktian melalui pencarian data apakah terdapat hubungan kausal antarvariabel. Pertama, penulis akan meneliti dan memaparkan bagaimana variabel independen terbentuk dan terus berkembang. Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah Islamofobia, variabel dependen (variabel terikat) dari penelitian ini yaitu kebijakan Perancis terhadap imigran. Sedangkan, *intervening variabel* penelitian ini yaitu tokoh politik dan kelompok penekan (*pressure group*). Kedua, setelah menganalisis variabel penelitian, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan munculnya Islamofobia, perkembangan Islamofobia, dan tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan Islamofobia di Perancis. Lebih jauh, penulis akan membuktikan Islamofobia di Perancis merupakan variabel yang mempengaruhi kebijakan Perancis terhadap imigran dan mengidentifikasi seberapa jauh tokoh politik dan kelompok penekan (*pressure group*) turut berperan mengkonstruksi Islamofobia sebagai langkah sekuritisasi dan dilembagakan menjadi sebuah kebijakan domestik dan luar negeri.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terbagi dalam empat bab penulisan. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi desain riset dari penelitian ini. Bab I penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian literatur, kerangka konseptual, serta metodologi penelitian. Pada bagian ini penulis menguraikan latar belakang diangkatnya Islamofobia di Perancis sebagai topik penelitian. Lebih jauh,

penulis menjelaskan berbagai asumsi dalam konsep sekuritisasi dan konstruktivisme linguistik yang digunakan sebagai pisau analisa penelitian. Bab II akan berisi selayang pandang mengenai asal mula dan dinamika imigran di Perancis. Bagian ini juga berisi penjelasan dan analisa bagaimana Islamofobia muncul dan berkembang di Perancis. Bab III berisi analisis secara mendalam bagaimana Islamofobia mempengaruhi kebijakan imigran di Perancis. Pertama, penulis mendeskripsikan figur politik dan kelompok penekan yang paling berpengaruh dalam politisasi Islamofobia. Kemudian, penulis akan membuktikan bahwa figur politik dan kelompok penekan berhasil mempengaruhi kebijakan imigrasi Perancis setelah melakukan politisasi Islamofobia. Penulis akan menganalisis berdasarkan konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu teori sekuritisasi dan konstruktivisme linguistik. Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian lebih lanjut. Bab ini akan mengemukakan temuan penelitian. Akan dilakukan evaluasi kekurangan-kekurangan penelitian ini serta memberikan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.